

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizomtal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 27
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid 2*, 2002, Jakarta: Ind-Hill Co
- Gatot Supramono. 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, edisi revisi, Ctk Kedua, Djambatan, Jakarta, hal. 114
- Hasannudin Rahman. *Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995. hal. 9
- Hikmahanto Juwana, 2002, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, hal. 3-4
- J Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku II*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998. Hal. 206-207
- \_\_\_\_\_, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*, Bandung 1998, Citra Aditya Bakti, hal. 196
- \_\_\_\_\_, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*, Bandung 1998, Citra Aditya Bakti, hal. 197
- \_\_\_\_\_, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*, Bandung 1998, Citra Aditya Bakti, hal. 199
- \_\_\_\_\_, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung Citra Aditya Bakti 202, hal. 278

- Johannes Ibrahim, *Menupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (perspektif) Hukum dan Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung. 2004, hal 24
- Jonker Sihombing, *Peran Dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Alumni Bandung, 2010, hal 2
- Kartono. *Hak-hak Jaminan Kredit*. Pradnya Paramita. Jakartya. 1977. hal. 98
- Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Cetakan ke 2, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990, hal. 467
- Mariam Darus Badruzaman. *Serial Hukum Perdata: Buku II Kompilasi Hukum Jaminan* Mandar Maju, Bandung. 2004, Hal. 86
- Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Legal Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2006, hal. 96
- Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 4, Jakarta : Kencana 2008, hal. 93
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Cet. 4, Jakarta : Kencana 2008, hal. 141
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataaan*, Cet. 2, Jakarta Sinar Grafika, 2009, hal. 335
- \_\_\_\_\_, *Hukum Jaminan Keperdataaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hal.438-439
- \_\_\_\_\_, *Hukum Jaminan Keperdataaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hal, hal. 445
- \_\_\_\_\_, *Pasal-Pasal tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Cetakan II, Djambatan, Jakarta:1999, Hal 69.

\_\_\_\_\_, *Pasal-Pasal tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Cetakan II, Djambatan, Jakarta:1999, Hal. 71-72

Sjahdeini, Sutan Remy, *Hak Tanggungan : Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan*, Bandung : Alumni

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 1

Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung, 1982, hal 13

Sutardja Sudrajat, *Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertifikatnya*, Bandung, Mandar Maju, 1997, hal. 54

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabata, Bandung, 2003,hal 2

### **Wawancara**

Agus Rianto, Wawancara Mantan *Branch Manager* Bank Tabungan Negara Kuningan Jakarta, 4 Januari 2016

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bank Indonesia No. 7/4/PBI/2005 Pasal 1 Angka 2

*Undang-Undang Tentang Perbankan* Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang No, 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Pasal 15 ayat 1

Undang-Undang No, 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Pasal 15 ayat 1

Undang-Undang No, 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Pasal 15 ayat 2

Undang-Undang No, 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 5

UU No 1 Tahun 2011, *Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman* Pasal 2 huruf e

Pejelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

